

ABSTRAK

Dalam skripsi ini, fokus utamanya adalah tentang regulasi Upaya Renvoi Procedure sebagai sarana hukum yang digunakan oleh para kreditor untuk melakukan perlawanan dalam kasus kepailitan. Selain itu, penelitian ini juga terkait terhadap pertimbangan yang diberikan oleh Majelis Hakim No. 161/Pdt.Sus-RenvoiProsedur/2020/PN Niaga.Jkt.Pst. mengenai apakah permohonan Renvoi Prosedur yang diajukan oleh PT Mitra Palmil telah mencapai keadilan atau belum.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Adapun sumber datanya sendiri yaitu data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data primer diperoleh dari bahan hukum yang merujuk pada materi hukum yang memiliki kekuatan mengikat. Data sekunder diperoleh dalam bentuk buku, artikel, hasil penelitian dan lain sebagainya, dan bahan hukum tersier yang berupa kamus hukum ataupun ensiklopedia hukum.

Hasil penelitian yang diperoleh dalam kasus Putusan No.161/Pdt.Sus-Renvoi Prosedur/2020/PN Niaga.Jkt.Pst ini adalah permohonan *Renvoi Procedure* yang ditolak oleh Pengadilan yang memiliki alasan berupa hal-hal yang ada dalam perjanjian tidaklah sama dengan pelaksanaan yang ada, dan juga terdapat beberapa kekeliruan yang dilakukan oleh debitur pailit sehingga adanya ketidaksesuaian dengan peraturan yang berlaku.

Kata Kunci: Perjanjian, Putusan No.161/Pdt.Sus-Renvoi Prosedur/2020/PN Niaga.Jkt.Pst, *Renvoi Procedure*.

ABSTRACT

The main focus of this thesis is on the regulation of the Renvoi Procedure as a legal tool used by creditors to resist in bankruptcy cases. Additionally, this research is also related to the considerations provided by the Panel of Judges No. 161/Pdt.Sus-RenvoiProsedur/2020/PN Niaga.Jkt.Pst. regarding whether the Renvoi Procedure application submitted by PT Mitra Palmil has achieved justice or not.

The approach method employed in this research is normative juridical. The data sources consist of secondary data, including primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Primary data is obtained from legal materials referring to legally binding legal content. Secondary data is acquired in the form of books, articles, research results, and others, as well as tertiary legal materials in the form of legal dictionaries or legal encyclopedias.

The research findings obtained in the case of Decision No. 161/Pdt.Sus-RenvoiProsedur/2020/PN Niaga.Jkt.Pst. show that the Renvoi Procedure application was rejected by the Court, citing reasons such as disparities between the contractual provisions and their implementation, along with several errors committed by the bankrupt debtor resulting in non-compliance with the applicable regulations.

Keywords: *Agreement, Decision No. 161/PDT.SUS-RenvoiProsedur/2020/PN Niaga.JKT.PST, Renvoi Procedure.*